

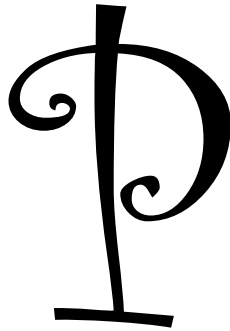
Laporan Kinerja (LKJ)

Tahun 2021

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Kata Pengantar



uji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat

Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan pada laporan ini. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak, Ibu dan rekan-rekan untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari bapak, ibu dan para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan periode selanjutnya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Jakarta, 14 Januari 2021
Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Mochamad Idnillah, S.T

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas dan Fungsi	2
1.3	Isu Strategis	8
1.4	Sistematika Penyajian	10

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	12
2.2	Perjanjian Kinerja	14
2.3	Rencana Aksi	16

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2	Akuntabilitas Keuangan	32

PENUTUP

DATA DUKUNG

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 2	Rencana Aksi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021
Tabel 3	Capaian sasaran strategis (SS) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 4	Rata – rata pendapatan nelayan / bulan
Tabel 5	Perbandingan capaian rata – rata pendapatan nelayan / bulan
Tabel 6	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan
Tabel 7	Perbandingan capaian persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan
Tabel 8	Pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri
Tabel 9	Perbandingan capaian Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Natuna) yang mandiri
Tabel 10	Indeks Profesionalitas (IP) ASN
Tabel 11	Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN
Tabel 12	Nilai rekonsiliasi Kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 13	Perbandingan capaian Nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 14	Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar
Tabel 15	Perbandingan capaian Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar
Tabel 16	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 17	Perbandingan capaian hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 18	Hasil evaluasi tingkat epektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 19	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Di. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 20	Perbandingan capaian tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 21	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Tabel 22	Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

- 1 Bagan struktur organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
- 2 Dashboard aplikasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
- 3 Dashboard Aplikasi Kinerja Capaian Dit. Perizinan dan Kenelayanan

DAFTAR GRAFIK

- 1 Perbandingan capaian nilai rata – rata pendapatan nelayan
- 2 Perbandingan capaian persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan
- 3 Perbandingan capaian Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna
- 4 Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dit. Perizinan dan Kenelayanan
- 5 Perbandingan capaian nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan
- 6 Perbandingan capaian nilai MP Dit. Perizinan dan Kenelayanan
- 7 Perbandingan capaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 26.234.259.000,- (setelah revisi) yang tertuang pada DIPA Tahun 2021 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.465023/2021 Tanggal 30 Desember 2020. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021 memiliki 4 Sasaran Kerja yang didukung oleh 9 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2021	Tahun 2021	Persentase (%)
1	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata rata pendapatan nelayan (Rp.Juta/Nelayan/Bulan)	4,22	4,30	101,90
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100,52	100,52
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri (Kemandirian)	4	4	100
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	Indeks profesionalitas (IP) ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	73	83,11	113,85
		5	Nilai rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Nilai)	85,15	94,94	111,48
		6	Persentase Unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	84,34	100,40
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	65	100	153,85
		8	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Persen)	72,5	86,69	119,57
		9	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5	55	75,86

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha

penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2021 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021, melakukan penyusunan Laporan Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2021. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sepanjang tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

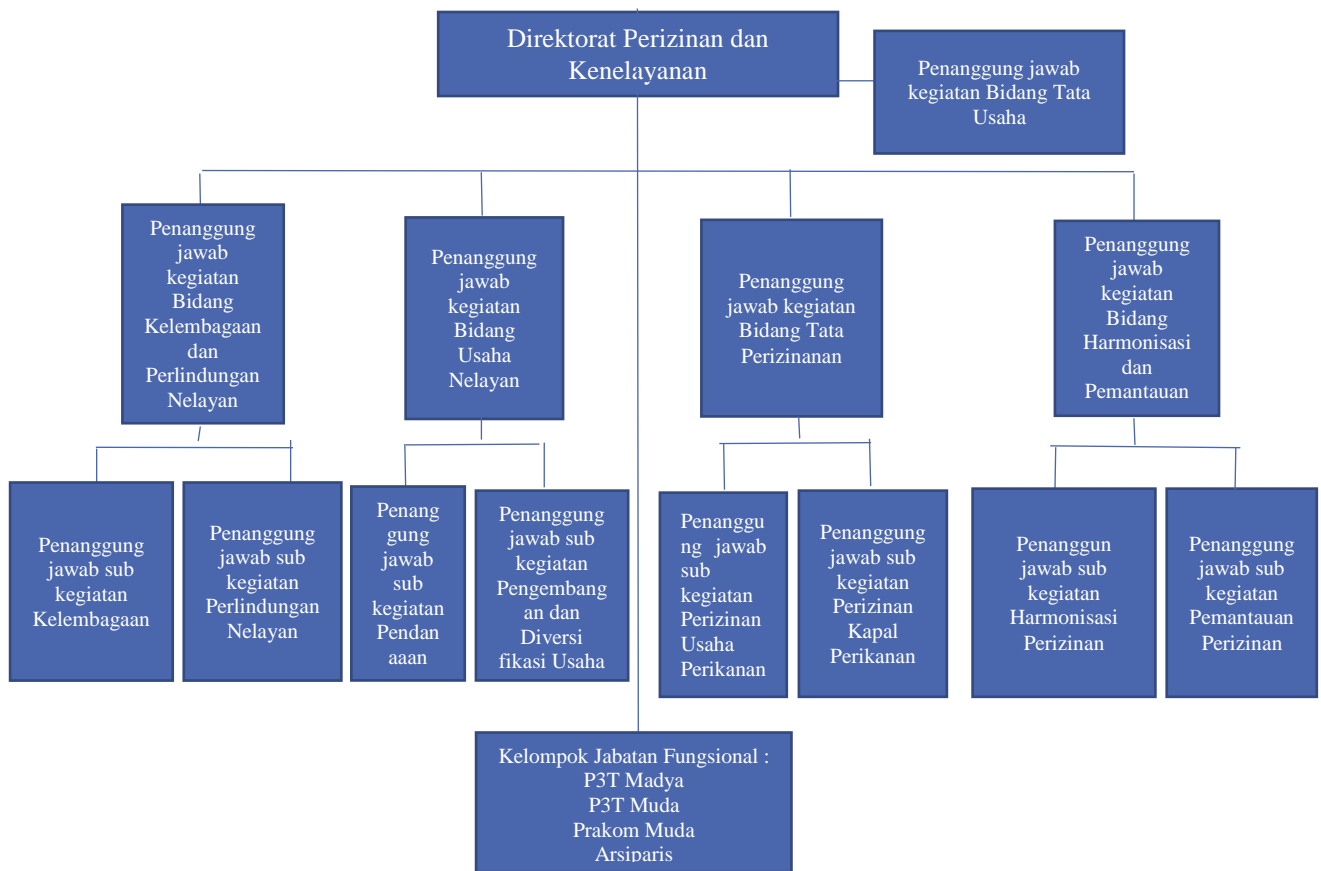
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusa tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Penanggung jawab kegiatan Bidang Tata Perizinan**, yang terdiri atas Penanggung jawab sub kegiatan Perizinan Usaha Perikanan dan Penanggung jawab sub kegiatan Perizinan Kapal Perikanan,
- b. **Penanggung jawab kegiatan Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan**, terdiri atas penanggung jawab sub kegiatan Harmonisasi Perizinan dan Penanggung jawab sub kegiatan Pemantauan Perizinan,
- c. **Penanggung jawab kegiatan Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan**, terdiri atas Penanggung jawab sub kegiatan Kelembagaan dan Penanggung jawab sub kegiatan Perlindungan Nelayan,
- d. **Penanggung jawab kegiatan Usaha Nelayan**, terdiri atas penanggung jawab sub kegiatan Pendanaan Usaha dan Penanggung jawab sub kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan,
- e. **Penanggung jawab Bidang Tata Usaha**; dan
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun bagan struktur organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dapat kita lihat pada gambar dibawah :



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

1.2.1 Penanggung jawab kegiatan Bidang Tata Perizinan

Penanggung jawab kegiatan Bidang Tata Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan usaha perikanan, perizinan kapal perikanan, verifikasi dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, analisis pungutan kapal perikanan, analisis penyiapan dan penerbitan perizinan usaha dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Penanggung jawab kegiatan Bidang Tata Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)/Surat Izin Usaha Perikanan Indonesia (SIKPI), penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan, rekomendasi pemberian sanksi administrasi perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang identifikasi, analisis, dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan dan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, Penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibanding identifikasi, analisi dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;

1.2.2 Penanggung Jawab Kegiatan Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan

Penanggung jawab kegiatan Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang Harmonisasi dan Pemantauan perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Penanggung jawab kegiatan Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis

laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;

1.2.3 Penanggung jawab kegiatan Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan

Penanggung jawab kegiatan Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang Kelembagaan dan perlindungan nelayan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Penanggung jawab kegiatan Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan kebijakan di bidang fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama(KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi

nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;

1.2.4 Penanggung jawab kegiatan Bidang Usaha Nelayan

Penanggung jawab kegiatan Bidang Usaha Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pendanaan usaha serta pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Penanggung jawab kegiatan Bidang Usaha Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;

1.2.5 Penanggung jawab Sub Kegiatan Bidang Tata Usaha

Penanggung jawab sub kegiatan Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan kinerja dan barang milik Negara, Sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

1.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

1.3 ISU STRATEGIS

Permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem. Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni permasalahan sumber daya ikan, sarana dan prasarana serta permasalahan pada pelayanan dan pengembangan usaha.

1.3.1 Sumber Daya Ikan

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi SDI yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi SDI (kepentingan ekonomi) harus

seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok SDI yang harus menjadi perhatian masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap sebagai berikut:

- a. Masih maraknya *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU) Fishing;
- b. Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI antar WPP-NRI;
- c. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
- d. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
- e. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya, dan sarana dan prasarana pendukung usaha penangkapan ikan lainnya. Permasalahan-permasalahan pokok terkait sarana dan prasarana dalam pengembangan perikanan tangkap antara lain sebagai berikut:

- a. Struktur armada penangkapan ikan masih didominasi oleh armada skala kecil (di bawah 5 GT) dengan kemampuan yang terbatas;
- b. Masih banyaknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Sebaran pelabuhan perikanan tidak merata dan sebagian besar di Indonesia Bagian Barat;
- d. Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan belum lengkap sehingga masih ada pelabuhan perikanan yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik;
- e. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan perikanan, termasuk sistem pendataan, peningkatan investasi, dan pengendalian lingkungan;
- f. Kurangnya kesadaran stakeholders dalam memanfaatkan fasilitas dan kawasan pelabuhan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Jumlah tenaga syahbandar yang masih kurang;
- h. Cara penanganan ikan di pelabuhan perikanan belum optimal;
- i. Belum seluruh pelabuhan perikanan melaksanakan ketelusuran asal ikan (traceability)/penerapan SHTI untuk kepentingan produk ekspor maupun konsumsi dalam negeri;
- j. Ketersediaan infrastruktur termasuk listrik khususnya di luar pulau Jawa yang masih terbatas sehingga mempengaruhi usaha penangkapan.

1.3.3 Usaha dan Kenelayanan

Beberapa permasalahan pokok terkait usaha dan kenelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan nelayan yang masih tinggi;
- b. Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha nelayan yang masih kecil dan perlu terus ditingkatkan;
- c. Rendahnya akses usaha nelayan terhadap permodalan yang antara lain disebabkan dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang belum optimal terhadap usaha perikanan tangkap;
- d. Rantai tata niaga perikanan yang masih panjang sehingga merugikan nelayan;
- e. Masih minimnya perlindungan sosial bagi nelayan;
- f. Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang perikanan tangkap yang masih perlu ditingkatkan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulanan sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam

rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perizinan dan kenelayanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Pendapatan Nelayan Meningkatkan”, dengan indikator kinerja: Rata – rata pendapatan nelayan (Rp.juta/nelayan/bulan);
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan ”, dengan indikator kinerja: Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan ;
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah " Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri ", dengan indikator kinerja: Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah " Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan “ dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
 - b. Nilai Rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
 - c. Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
 - e. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
 - f. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan .

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
<i>COSTUMER PERSPEKTIVE</i>				
1	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp.juta/nelayan/bulan)	4,22
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100
<i>INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE</i>				
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri (Kemandirian)	4
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE</i>				
4	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	Indeks profesionalitas (IP) ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	73
		5	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85,15
		6	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	84
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	65
		8	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	72,5
		9	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021, secara rinci sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Direktur Perizinan dan Kenelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

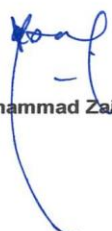
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Perizinan dan Kenelayanan


Muhammad Zaini


Ridwan Mulyana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp. Juta/nelayan/bulan)	4,22
2.	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (tingkat kemandirian)	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	73
		5	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85,15
		6	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	65
		8	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5
		9	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Jumlah Anggaran Tahun 2021 : **Rp. 26.234,259.000,-**

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Perizinan dan Kenelayanan


Ridwan Mulyana

2.3 RENCANA AKSI

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Rencana Aksi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Pendapatan Nelayan meningkat	
a.	Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya (SIMANTEP)	Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi perlindungan nelayan
		Fasilitasi perlindungan nelayan
b.	Jumlah Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang)	Identifikasi Bidang tanah nelayan untuk difasilitasi sertifikatnya
		Penyusunan/reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan
		Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
c.	Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)	Penyusunan pedoman pengembangan usaha nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan
		Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan
d.	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit per(nelayan)	Penyusunan/reviu pedoman pendanaan usaha nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
e.	Jumlah kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok)(kumulatif)	Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi Nelayan)
		Pelaporan hasil Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan nelayan
		Penyusunan/Reviu Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan
		Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
f.	Jumlah fasilitasi kawasan sentra / kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi)	Identifikasi rencana lokasi kampung nelayan yang akan difasilitasi penataannya
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penataan kampung nelayan
		Pelaksanaan fasilitasi penataan kampung nelayan
		Penyusunan petunjuk teknis penataan kampung nelayan (Kalaju)
		Pelaksanaan penataan kampung nelayan (Kalaju)

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
2	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan	
a.	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan	Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
		Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Penataan dan evaluasi alokasi izin usaha penangkapan ikan
b.	Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI)(unit)	Penerbitan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI/SIKPI)
		Evaluasi pemberian izin kapal perikanan (SIPI/SIKPI)
c.	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat - daerah	Integrasi Sistem Perizinan Daerah ke dalam Sistem Perizinan Pusat-Daerah
		Penyusunan/Reviu Pedoman Pengelolaan Perizinan Pusat dan Daerah
		Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah
		Analisis laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	
a.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (Tingkat Kemandirian)	Tata kelola kelambagaan dan operasional SKPT Natuna yang mandiri
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	
a.	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Mutasi
		Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
b.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
c.	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Monitoring dan evaluasi Persentase unit kerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
d.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	Monitoring dan evaluasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
e.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (%)	Monitoring dan evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (%)
f.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

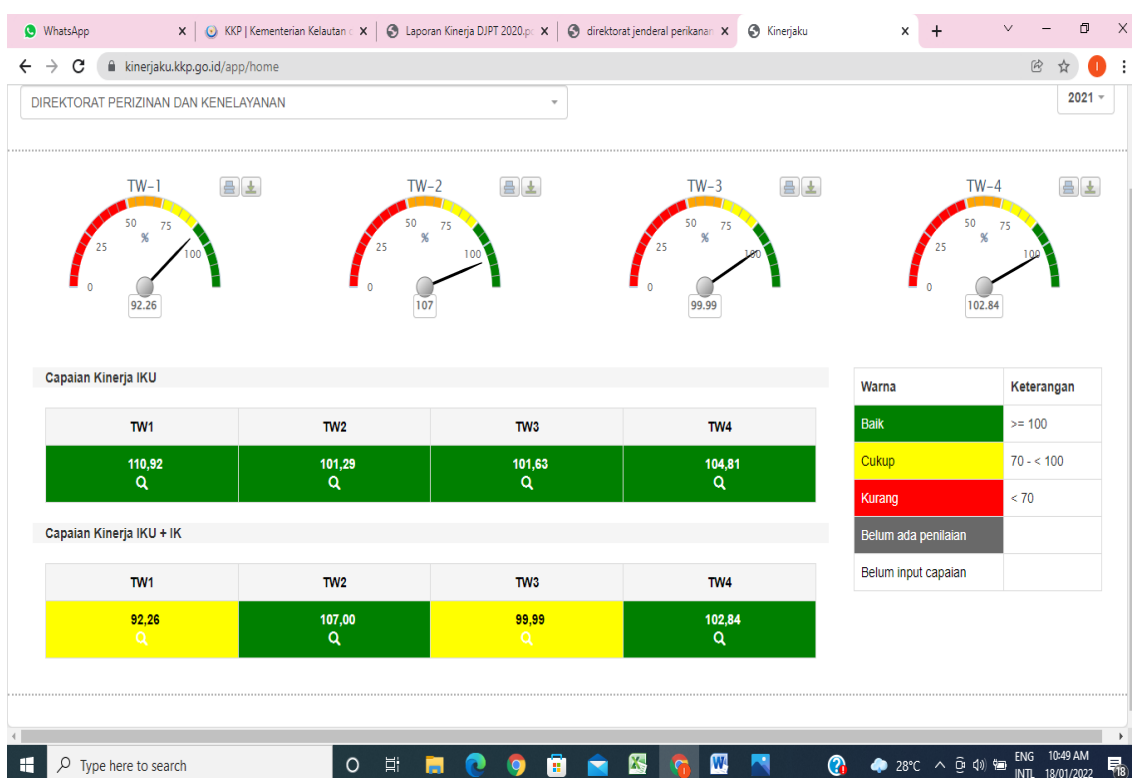
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2021 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Perizinan dan Kenelayanan menitikberatkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj)

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2021 diukur melalui 9 indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yakni sebagai berikut :

- Perspektif customer sebanyak 2 (Dua) indikator;
- Perspektif internal proses sebanyak 1 (satu) indikator;
- Perspektif learning and growth sebanyak 6 (Enam) indikator.

Rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah **102,84** persen dengan rincian pada Tabel 4 berikut.



Gambar 2. Dashboard aplikasi kinerjaku Dit. Perizinan dan Kenelayanan 2021

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	
				Tahun 2021	% thd Target Tahunan
COSTUMER PERSPEKTIVE					
1	Pendapatan nelayan meningkat	1 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp.Juta/Nelayan/Bulan)	4,22	4,30	101,90
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2 Persentase Penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100,52	100,52
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE					
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3 Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (Tingkat kemandirian)	4	4	100
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
4	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4 Indeks profesionalitas (IP) ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Indeks)	73	54,22	83,11
		5 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85,15	94,94	111,50
		6 Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	84	84,34	99,37
		7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	65	19,35	29,77
		8 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	72,5	86,69	119,57
		9 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5	55	75,86

3.1.1 Pendapatan nelayan meningkat

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Rata - rata pendapatan nelayan / bulan

1. Rata - rata pendapatan nelayan / bulan

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata selisih antara penerimaan dari hasil tangkapan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Rumah Tangga Produksi (RTP) tersebut selama periode tahun 2021 yang diukur dan dilaporkan setiap bulan. Adapun capaian rata-rata pendapatan nelayan/bulan untuk tahun 2021 adalah sebesar 4,30 atau sebesar 101,90% dari target tahunan. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 point jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100,45%.

Tabel. 4 Rata - rata pendapatan nelayan / bulan

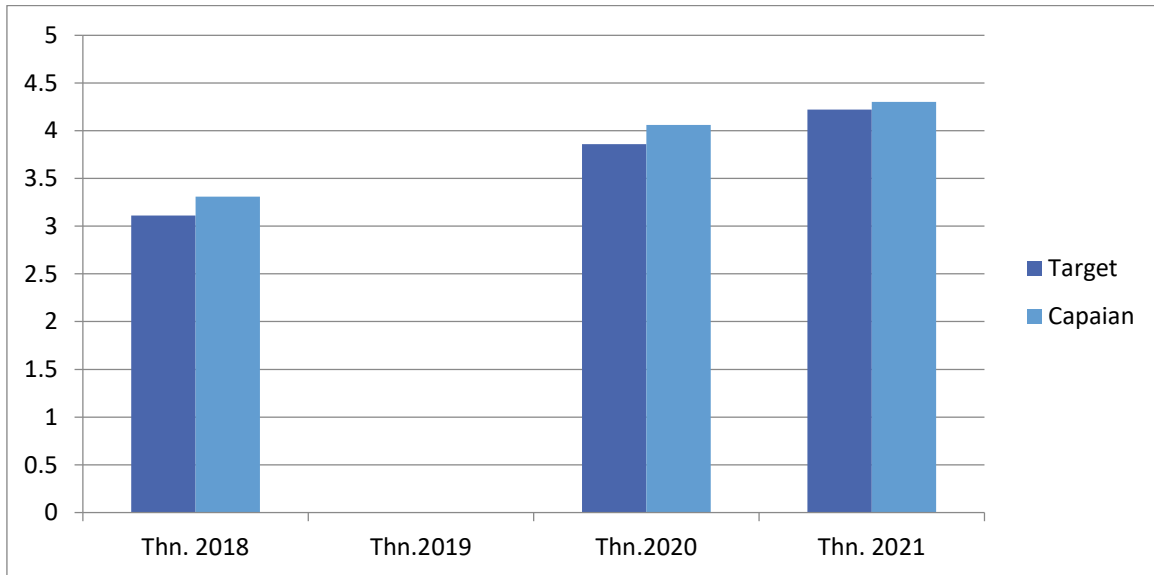
Satuan:Rp.Juta/bln/Nelayan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Tahun2021	%
Rata - rata pendapatan nelayan / bulan	4,22	4,30	101,90

Tabel. 5 Perbandingan capaian rata – rata pendapatan nelayan

Satuan:Rp.Juta/bln/Nelayan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Rata - rata pendapatan nelayan	4.22	4.3	4.06	0	3.31



Grafik 1. Perbandingan target dan capaian rata – rata pendapatan nelayan / bln

3.1.2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (Satu) indikator yakni, persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan

1. Persentase Penataan Perizinan usaha penangkapan ikan

Merupakan persentase penataan perizinan dilaksanakan melalui ijin usaha perikanan pusat yang diterbitkan , Realisasi kapal izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP, serta pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan daerah (SIMKADA) diseluruh Indonesia. Realisasi kapal izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP untuk tahun 2021 mencapai **5.478** unit sedangkan alokasi izin mencapai **9.428** unit dan implementasi integrasi system perizinan daerah (SIMKADA) sebanyak **34** provinsi. Adapun capaian persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan tahun 2021 sebesar **100,52%** atau sebesar **100,52%** dari target. Capaian ini sedikit

mengalami penurunan sebanyak **0,48** point dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai **101%**.

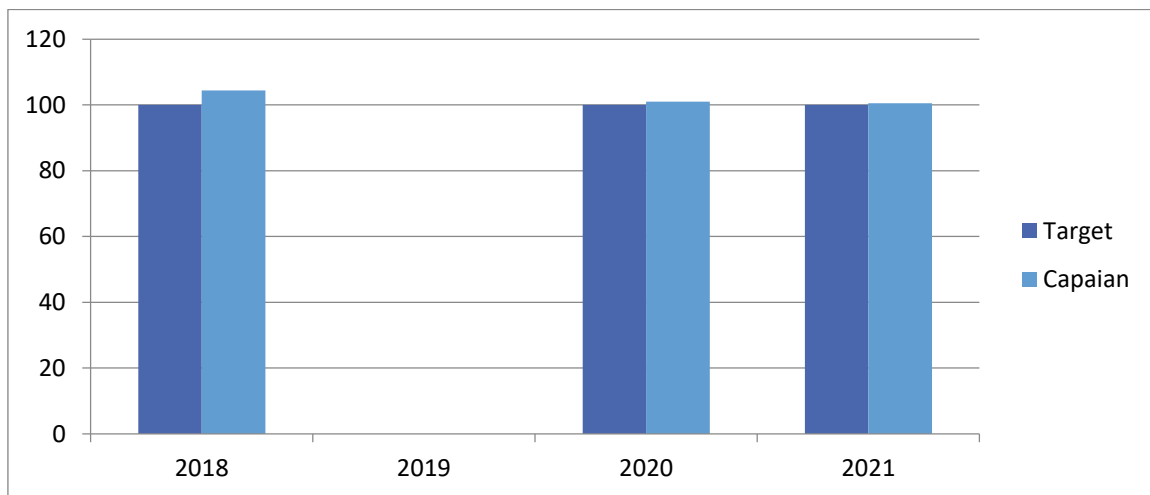
Tabel. 6 Persentase Penataan Perizinan usaha penangkapan ikan

Satuan : %

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	%
Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	100	100,52	100,52

Tabel. 7 Perbandingan Capaian Persentase Penataan Perizinan usaha penangkapan ikan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan	100	100.52	101	0	104.36



Grafik 2. Tabel perbandingan capaian persentase penataan perizinan

3.1.3 Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri.

1. Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT merupakan bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau pulau kecil dan / atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggung jawab ditetapkan melalui Permen KP Nomor 40/PERMENKP/2016

tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di pulau - pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kepulauan Natuna, merupakan salah satu wilayah terluar dan daerah perbatasan yang menjadi lokasi SKPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perairan Natuna berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP-NRI 711 yang diketahui menyimpan potensi perikanan tangkap yang besar mencapai 1,1 juta ton/tahun (Data Komnaskajiskan). Dan kegiatan SKPT Natuna dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Data dan informasi yang digunakan 19 untuk penilaian SKPT yang mandiri diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, Laporan), data sekunder, dan focus group discussion (FGD). Selanjutnya untuk mengetahui Ada empat hal yang hendak dicapai dari pembangunan SKPT Natuna. Pertama SKPT diharapkan bisa menumbuhkan sistem bisnis perikanan di Natuna. Kedua, keberadaan SKPT diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat Natuna. Ketiga, SKPT bisa menjadi solusi pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan penduduk baik di Natuna dan daerah lain di Indonesia, dan yang terakhir, SKPT diharapkan bisa mendongkrak peningkatan ekspor hasil perikanan Natuna. Pembangunan SKPT Natuna dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan perikanan seperti dermaga, jalan, drainase dan trotoar, kantor pengelola pelabuhan, listrik PLN, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, air bersih, tempat pemasaran/pelelangan ikan, pengolahan limbah/IPAL, integrated cool storage/ICS, pabrik es, kios perbekalan nelayan, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya seperti truk mini crane, mobil tangki air dan kendaraan pengangkut sampah. Sampai saat ini ditetapkan Produksi perikanan SKPT Natuna sebesar 1,9 juta Kg (kumulatif), Produksi es sebesar 878.525 Kg (kumulatif) dan Penyaluran air bersih sebesar 957.950 L (kumulatif). Tercapainya target produksi perikanan dan juga produksi es sedangkan air bersih tidak tercapai karena kerusakan mesin produksi air (BWRO) SKPT Natuna. Peran BUMN Perum Perindo sebagai bisnis perikanan di SKPT Natuna juga menurun. Pandemi Covid menjadi salah satu penyebab menurunnya penjualan ikan BUMN Perindo sehingga secara sistemik mempengaruhi tingkat pembelian bahan baku termasuk mempertimbangkan stok ikan yang belum keluar dari cold storage. Tetapi, pencapaian produksi perikanan di SKPT Natuna tetap tercapai.

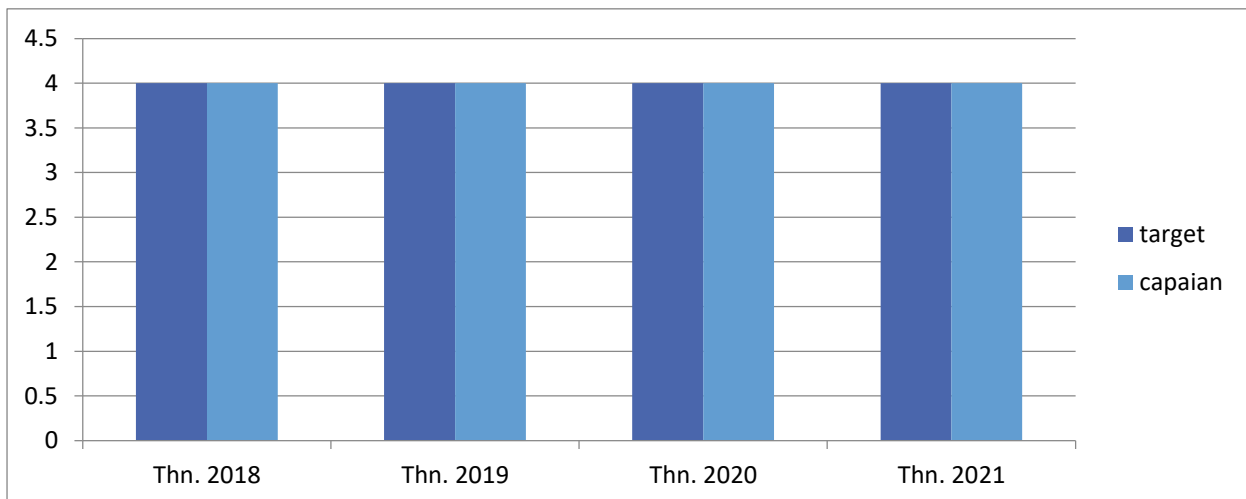
Tabel. 8 Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Tahun2021	%
Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	4	4	100

REKAPITULASI PRODUKSI IKAN TAHUN 2021																	
BULAN	JUMLAH KAPAL MASUK (KAPAL)				JUMLAH (KAPAL)	FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL				JUMLAH FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL (KALI)	NILAI PRODUKSI (Rp)	JUMLAH PRODUKSI (KG)	AIR BERSIH (Liter)	BBM (Liter)	ES (Kg)	SPB (Dokumen)	PNBP (Rp)
	<10 GT	10-20 GT	>20-30 GT	>30 GT		<10 GT	10-20 GT	20-30 GT	>30 GT								
Januari	4	2	47	3	56	7	2	52	3	64	1,792,926,000	65,153	-	17,160	-	57	1,860,516
Februari	1	2	41	1	45	1	4	72	2	79	2,502,595,000	87,035	-	1,160	-	78	731,830
Maret	-	2	42	9	53	-	2	57	10	69	2,003,279,000	74,417	30,000	91,500	-	69	9,180,680
April	-	2	44	14	60	-	5	69	16	90	3,839,693,000	164,444	363,000	62,000	35,375	90	13,456,800
Mei	-	2	26	9	37	-	2	28	11	41	2,305,872,000	160,540	48,000	24,000	1,250	41	8,382,700
Juni	-	1	39	25	65	-	2	64	28	94	2,976,350,000	134,550	-	72,000	1,000	81	9,741,600
Juli	-	1	42	9	52	-	1	45	9	55	1,778,270,000	118,320	16,000	80,000	-	55	7,675,100
Agustus	20	5	39	21	85	39	7	78	21	145	3,977,679,000	221,199	-	80,000	-	89	8,526,743
September	24	2	41	17	84	63	3	50	19	135	3,145,924,000	232,703	167,200	89,700	240,625	61	14,956,670
Oktober	39	1	31	18	89	106	1	45	19	171	2,314,294,000	145,143	157,700	75,520	245,750	57	15,150,640
November	37	1	27	22	87	142	1	36	25	204	5,919,075,000	374,754	121,150	98,260	168,975	51	21,544,870
Desember					0					0	3,009,504,000	165,059	54,900	64,130	185,550		5,288,800
JUMLAH	125	21	419	148	713	358	30	596	163	1,147	35,565,461,000	1,943,317	957,950	755,430	878,525	729	116,496,949

Tabel. 9 Perbandingan capaian Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri

Nama IKU	Target Tahun. 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	4	4	4	4	4



Grafik 3. Perbandingan capaian Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

3.1.4 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 6 (satu) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, (2) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, (3) Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, (5) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas /

strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, (6) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun. Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

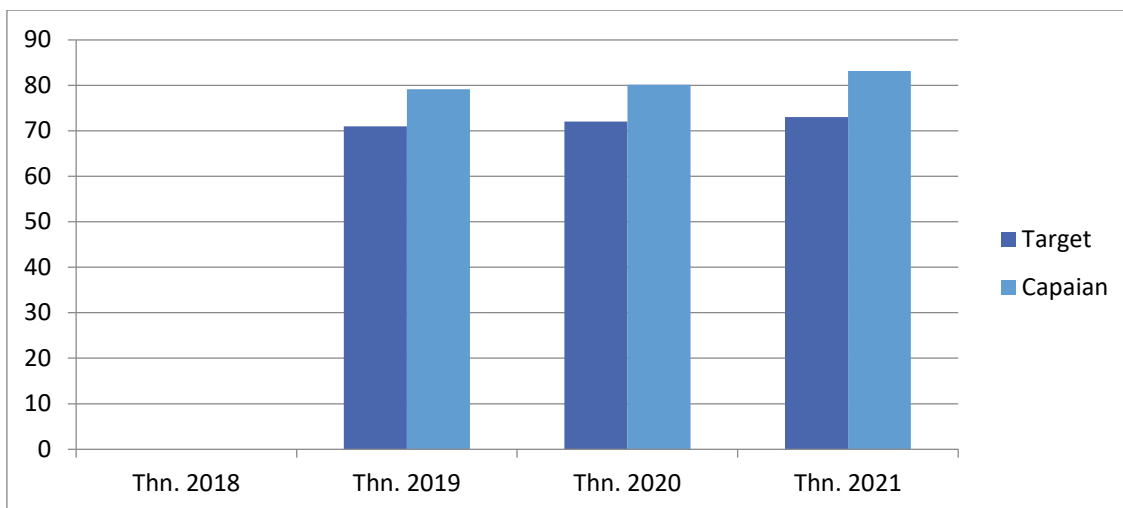
Adapun perhitungan capaian ini dilakukan secara semesteran. Pada tahun 2021, IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mencapai **83,11** atau sebesar **113,85%** dari target. dengan kategori tinggi.

Tabel. 10. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn.2021	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan	73	83,11	113,85

Tabel. 11 Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun. 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	73	83.11	80.13	79.15	-



Grafik 4. Perbandingan capaian IP ASN Direktorat Perlindungan Nelayan

2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun tujuan rekonsiliasi itu sendiri adalah (1) meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, (2) meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, (3) memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Output rekonsiliasi menggambarkan nilai kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian masing masing unit kerja. Adapun nilai capaian nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021 adalah **94,94** atau sebesar **111,50%** dari target tahunan.

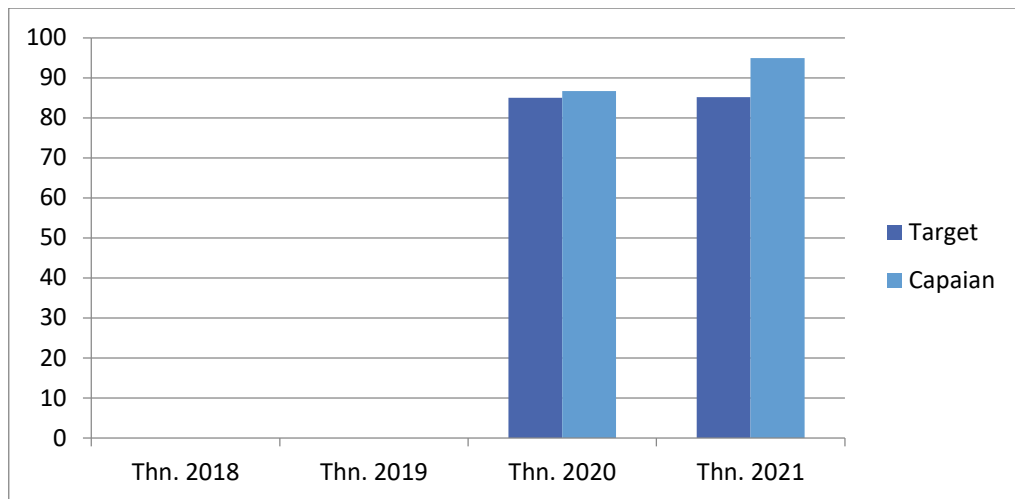
Tabel 12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn.2021	%
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	85,15	94,94	111,50

Tabel 13. Perbandingan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun. 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	85.15	94.94	86.70	-	-

Pada tahun 2018 dan 2019, nilai capaiannya tidak ada karena pada tahun tersebut IKU ini tidak termasuk dalam IKU Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sesuai Perjanjian Kinerja .



Grafik 5. Perbandingan capaian nilai rekonsiliasi kinerja Dit. PDK

3. Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

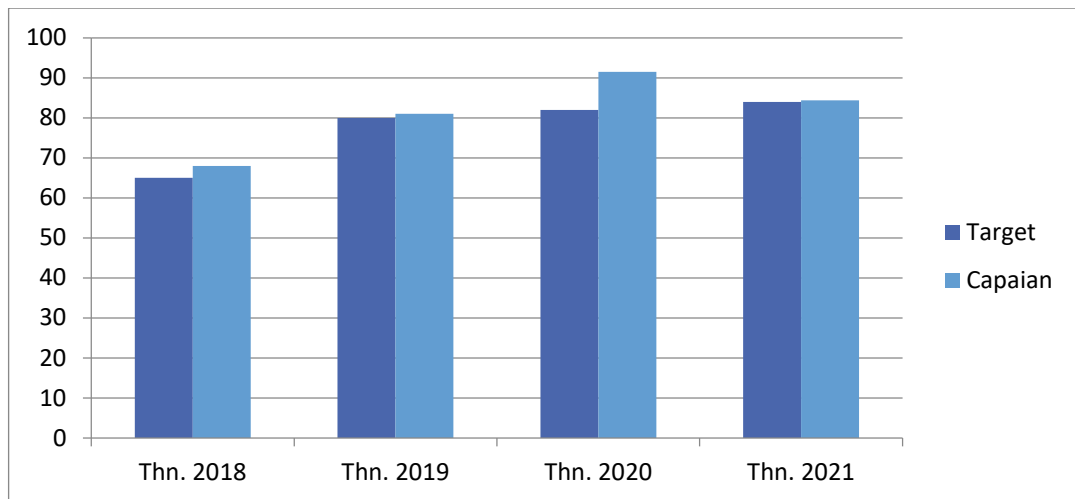
Sistem Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penerapan manajemen pengetahuan lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan dilakukan melalui 3 komponen yakni : (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dalam aplikasi Bitrix24 KKP dan (3) Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP. Adapun capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2021 adalah sebesar **84,34** atau sebesar 100,40% dari target tahunan.

Tabel 14. Persentase Unit Dir.Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn.2021	%
Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	84	84,34	100,40

Tabel 15. Perbandingan capaian Persentase Unit Dir.Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar

Nama IKU	Target Tahun. 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	84	84.34	91.50	81.02	68



Grafik 6. Perbandingan capaian nilai MP Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

4. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan IV Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menjadi objek pengawasan. Adapun capaian yang dapat dilaporkan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sebesar 153,85% dari target tahunan. Dengan total temuan sebanyak 5 Kasus dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 5 kasus. Angka ini sangat jauh dari nilai capaian sebelumnya (triwulan III), yang hanya mencapai 19,35%.

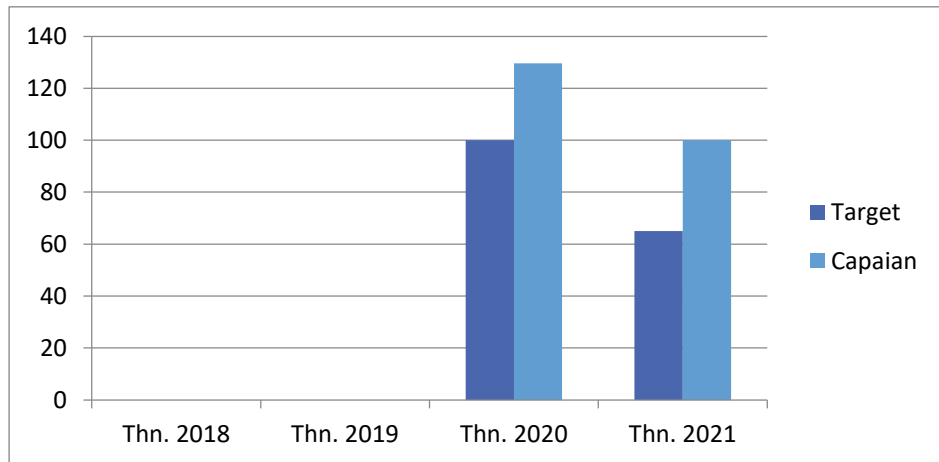
Tabel. 16 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn.2021	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	65	100	153.85

Tabel. 17 Perbandingan Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun. 2021	Capaian			
		Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	65	100	129.63	-	-

Pada tahun 2018 dan Tahun 2019, tidak ada capaian, karena pada tahun tersebut IKU ini tidak termasuk dalam IKU Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2021.



Grafik 7. Perbandingan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan

5. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2020, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan evaluasi Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020. Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan pada tanggal 4 s.d. 15 Oktober 2021.

Uji petik dilakukan pada 5 dari 32 provinsi penerima bantuan (15,63%), yaitu: 1) Sumatera Selatan; 2) Lampung; 3) Jawa Barat; 4) Jawa Timur; dan 5) Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Adapun aspek yang dievaluasi adalah:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatan bantuan, pengalihan kepemilikan, penambahan pendapatan dan/atau mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup DJPT Tahun 2020, Direktorat Perizinan dan Kenyelayan mendapat nilai **86,69** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 18. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup DJPT Tahun 2020

JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
<i>Chest Freezer</i>	80	77	73,70	8,08	3,90	85,68
Kendaraan Roda 3 Berinsulasi	41	41	76,83	8,35	3,41	88,60
TOTAL DIT. PDK	121	118	74,79 **	8,18 **	3,73**	86,69**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan DJPT

Evaluasi lebih lanjut terhadap pengelolaan bantuan pemerintah tersebut disampaikan sebagai berikut:

Hasil yang dicapai, antara lain:

a. **Chest Freezer**

Sebanyak 72 dari 77 penerima bantuan chest freezer atau 93,51% dapat mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan dan/atau meningkatkan pendapatannya, dengan rincian 15 penerima di Provinsi Sumatera Selatan, 30 penerima di Provinsi Jawa Barat, dan 27 penerima di Provinsi Jawa Timur.

b. **Kendaraan Roda 3 Berinsulasi**

Sebanyak 40 dari 41 penerima bantuan kendaraan roda 3 berinsulasi atau 97,56% dapat mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan dan/atau meningkatkan pendapatannya, dengan rincian 1 penerima di Provinsi Sumatera Selatan, 27 penerima di Provinsi Jawa Barat, dan 12 penerima di Provinsi Jawa Timur.

Tabel. 19 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenyelayan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn.2021	%
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenyelayan	72,5	86,69	119,57

Tabel. 20 Perbandingan capaian Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenyelayan

Nama IKU	Target	Capaian			
	Tahun. 2021	Thn. 2021	Thn. 2020	Thn. 2019	Thn. 2018
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenyelayan	72.5	86.69	92.93	-	-

Pada tahun 2019 dan tahun 2018, tidak ada capaian, karena pada tahun tersebut IKU ini tidak termasuk dalam IKU Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2021.

6. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun capaian sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar 55 atau sebesar

Tabel. 21 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2021	Capaian Thn. 2021	%
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	72,5	55	75.86

Untuk capaian IKU ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.625.130.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA- 032.03.1.465023/2021 tanggal 29 November 2020. Namun seiring perkembangan kebijakan, alokasi anggaran telah beberapa mengalami revisi. Adapun alokasi anggaran berdasarkan revisi terakhir saat ini, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.26.234.259.000,- adapun alokasi dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021, Berdasarkan jenis kegiatan

REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	26,234,259,000	26,000,146,989	99.11
1	Perizinan Produk	832,760,000	832,538,708	99.97
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9,964,779,000	9,959,744,521	99.95
3	Bantuan Sarana Usaha Penangkapan Ikan dan Perlindungan Nelayan Yang Disalurkan	3,586,000,000	3,586,000,000	100.00
4	Perizinan Produk	624,020,000	616,814,295	98.85
5	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5,644,400,000	5,467,661,040	96.87
	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya (PEN)	975,000,000	879,340,395	90.19
	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2,950,000,000	2,928,448,160	99.27
	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1,719,400,000	1,659,872,485	96.54
6	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2,003,550,000	1,973,517,495	98.50
	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1,367,800,000	1,361,499,185	99.54
	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	635,750,000	612,018,310	96.27
7	Bantuan Kelompok Masyarakat	844,750,000	844,749,167	100.00
8	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	750,000,000	737,215,820	98.30
9	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,984,000,000	1,981,905,943	99.89

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar **102,84** persen. Angka ini mengalami peningkatan dari angka capaian tahun sebelumnya (**101,99%**) sebagaimana pada Gambar berikut ini.

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		sid TW-3		TW-4		sid TW-4	
						TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
1	Pendapatan nelayan meningkat	IKSK.01.01	Rata-rata pendapatan nelayan Dashboard	Rp. Juta/nelayan/bulan	Maximize	4.34	4.42	4.43	4.45	4.39	4.44	4.05	4.11	4.27	4.33	4.10	4.30	4.23	4.32
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	IKSK.02.02	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan Dashboard	persen	Maximize	30.00	108.33	50.00	108.21	50.00	108.21	70.00	108.50	70.00	108.50	100.00	100.52	100.00	100.52
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	IKSK.03.03	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nasional Dashboard	tingkat kemandirian	Maximize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.04	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	indeks	Maximize	0.00	0.00	85.00	84.22	85.00	84.22	85.00	84.22	85.00	84.22	73.00	83.11	73.00	83.11
5	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.05	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	nilai	Maximize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15	84.84	85.15	84.84
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.06	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Dashboard	persen	Maximize	84.00	89.22	84.00	83.47	84.00	83.47	84.00	84.34	84.00	84.34	84.00	84.34	84.00	84.34
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.07	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	persen	Maximize	85.00	0.00	85.00	100.00	85.00	100.00	85.00	18.35	85.00	18.35	85.00	100.00	85.00	100.00
8	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.08	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan protas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	persen	Maximize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	88.89	72.50	88.89
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	IKSK.04.09	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dashboard	persen	Maximize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	85.00	72.50	85.00

Gambar 3

Dashboard KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target, hanya 1 indikator saja yaitu :
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :
 - a. Perlu ditingkatkan kepedulian, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh masing – masing pimpinan unit kerja mengingat fokus utama saat ini adalah beberapa kegiatan prioritas masing – masing unit kerja;
 - b. Perlunya penetapan SOP Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja melalui Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja yang tetap dan tidak berubah-ubah;
 - c. Perlu diupayakan proses percepatan validasi data statistik perikanan tangkap sehingga data capaian yang digunakan adalah data yang handal dan dapat dipercaya;

DATA DUKUNG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM

Nomor: 48/DJPT.5/RC.510/I/2022

Yth : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 Januari 2022

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.73/DJPT.1/TU.330/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 perihal Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan, serta Monitoring Pelaporan Berbasis Web Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Mochamad Idnillah

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Koordinator Kelompok Program, Sesditjen PT

Lampiran 1.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
2021

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2021	Tahun 2021	Persentase (%)
1	Pendapatan nelayan meningkat	1	Rata rata pendapatan nelayan (Rp.Juta/Nelayan/Bulan)	4,22	4,30	101,90
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100,52	100,52
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri (Kemandirian)	4	4	100
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	Indeks profesionalitas (IP) ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	73	83,11	113,85
		5	Nilai rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Nilai)	85,15	94,94	111,48
		6	Persentase Unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	84,34	100,40
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	65	100	153,85
		8	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Persen)	72,5	86,69	119,57
		9	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5	55	75,86

Jakarta , 14 Januari 2021
Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan


Mochamad Idnillah

Lampiran 2.

DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2021

1. Rata – rata pendapatan nelayan (Rp.Juta/Nelayan/bulan)

CAPAIAN VOLUME DAN NILAI PRODUKSI SERTA PENDAPATAN TAHUN 2021											
No	Rincian	TAHUN 2021									
		Target TW I	Capaian TW I	Target TW II	Capaian TW II	Target TW III	Capaian TW III	Target TW IV	Capaian TW IV	TARGET 2021	CAPAIAN SEMENTARA 2021
1	Produksi (Juta Ton)	1.93	1.98	2.08	1.89	2.01	1.94	2.07	2.28	8.08	8.09
	- Laut	1.81	1.83	1.91	1.74	1.84	1.79	1.91	2.12	7.47	7.49
	- Perairan Umum	0.12	0.15	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15	0.16	0.61	0.60
2	Nilai Produksi (Rp. Trilyun)	61.08	61.23	62.24	48.07	56.92	58.90	57.65	72.91	237.90	241.11
	- Laut	56.65	56.72	57.67	44.03	52.74	54.95	53.41	67.54	220.48	223.24
	- Perairan Umum	4.43	4.51	4.57	4.04	4.18	3.95	4.24	5.37	17.42	17.87
6	Rata-rata pendapatan RTP/ Juta/Bln	12.03	12.24	12.26	12.33	11.21	11.37	11.36	11.92	11.71	12.05
	- Laut	15.36	15.55	15.64	15.67	14.30	14.48	14.48	15.20	14.95	15.30
	- Perairan Umum	3.99	4.28	4.11	4.29	3.76	3.86	3.81	4.01	3.92	4.24
8	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp. Juta/Nelayan/Bln)	4.34	4.42	4.43	4.45	4.05	4.11	4.10	4.30	4.23	4.35
	- Laut	4.62	4.68	4.71	4.71	4.30	4.36	4.36	4.57	4.50	4.60
	- Perairan Umum	2.78	2.99	2.86	2.99	2.62	2.69	2.66	2.80	2.73	2.96

2. Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%	
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	100.52	100.52
a		Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit)	9,600	9428	98.21	
b		Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIP/SKPI) (unit)	5,300	5478	103.36	
c		Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	34	34	100.00	

a. Jumlah alokasi izin yang diterbitkan dan jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI)(Unit)

9,428

Jumlah Alokasi Kapal

5,478

Jumlah Kapal Aktif

Data Alokasi SIUP (Kapal) Aktif Per Alat Tangkap

ALAT TANGKAP	JUMLAH ALOKASI
Bagan Berperahu	140
Bouke Ami	283
Bubu (Pots)	9
Huhate	36
Huhate (Pole and Line)	106
Jala Jatuh Berkawal	722
Jala Jatuh Berkawal (Cast Nets)	649
Jaring Hela Ikan Berkantong	3
Jaring Hela Udang Berkantong	74
Jaring Insang Hanyut	594
Jaring Insang Oseanik	507
Jaring Insang Tetap	60
Jaring Liong Bun	409
Jaring Tarik Berkantong	4
Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	161
Jaring Tarik Berkantong (Freezer)	326
Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan	183
Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	132
Total	9,428

Data SIPI/SIKPI Aktif Per Alat Tangkap

ALAT TANGKAP	JUMLAH KAPAL AKTIF
Bagan Berperahu	1
Bouke Ami	230
Bubu (Pots)	2
Huhate	17
Huhate (Pole and Line)	52
Jala Jatuh Berkawal	182
Jala Jatuh Berkawal (Cast Nets)	870
Jaring Hela Udang Berkantong	4
Jaring Insang Hanyut	225
Jaring Insang Oseanik	305
Jaring Insang Tetap	11
Jaring Liong Bun	17
Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan	50
Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	32
Kapal Pengangkut Ikan di Laut Lepas	6
Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan	3
Kapal Pengangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan	4
Pancing Cumi	64
Total	5,478

b. Jumlah provinsi yang mengintegrasikan system perizinan pusat – darah

PROVINSI	JUMLAH SIPI/SIKPI
KALIMANTAN UTARA	1
KALIMANTAN SELATAN	2
MALUKU UTARA	9
JAMBI	10
DI. YOGYAKARTA	14
NUSA TENGGARA TIMUR	20
SUMATERA SELATAN	35
BANTEN	53
KEPULAUAN RIAU	117
RIAU	142
GORONTALO	159
BALI	161
SULAWESI BARAT	178
KALIMANTAN TIMUR	183
LAMPUNG	230
KEPULAUAN BANGKA	242
BELITUNG	252
MALUKU	252
SULAWESI TENGAH	253
NUSA TENGGARA BARAT	316
KALIMANTAN BARAT	391
PAPUA BARAT	396
SULAWESI TENGGARA	396
SUMATERA BARAT	410
JAWA TIMUR	512
JAWA BARAT	576
PAPUA	591
SULAWESI UTARA	657
DKI. JAKARTA	883
SUMATERA UTARA	935
JAWA TENGAH	1,507
SULAWESI SELATAN	2,328
Total	11,959

3. Tingkat kemandirian Sentra Kelauatan dan Perikanan (SKPT) Natuna yang mandiri

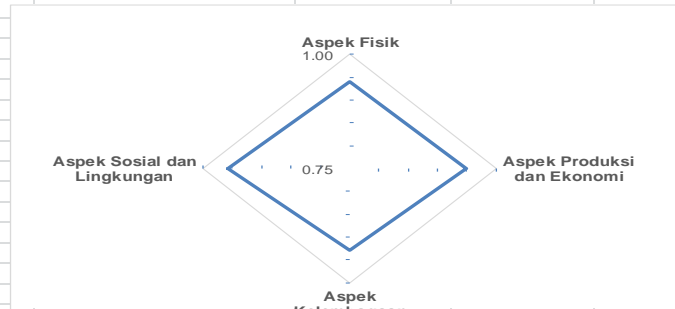
PENILAIAN STATUS PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

Nama Lokasi : **KABUPATEN NATUNA**
 Periode : Desember 2021

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0.94
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.95
Aspek Kelembagaan	0.93
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.96
Nilai Rata-Rata	0.94



Pra Mandiri 4



- Aspek Fisik
- Aspek Kelembagaan
- Nilai Rata-Rata
- Aspek Produksi dan Ekonomi
- Aspek Sosial dan Lingkungan

REKAPITULASI PRODUKSI IKAN TAHUN 2021																	
BULAN	JUMLAH KAPAL MASUK (KAPAL)				JUMLAH (KAPAL)	FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL				JUMLAH FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL (KALI)	NILAI PRODUKSI (Rp)	JUMLAH PRODUKSI (KG)	AIR BERSIH (Liter)	BBM (Liter)	ES (Kg)	SPB (Dokumen)	PNBP (Rp)
	<10 GT	10-20 GT	>20-30 GT	>30 GT		<10 GT	10-20 GT	20-30 GT	>30 GT								
Januari	4	2	47	3	56	7	2	52	3	64	1,792,926,000	65,153	-	17,160	-	57	1,860,516
Februari	1	2	41	1	45	1	4	72	2	79	2,502,595,000	87,035	-	1,160	-	78	731,830
Maret	-	2	42	9	53	-	2	57	10	69	2,003,279,000	74,417	30,000	91,500	-	69	9,180,680
April	-	2	44	14	60	-	5	69	16	90	3,839,693,000	164,444	363,000	62,000	35,375	90	13,456,800
Mei	-	2	26	9	37	-	2	28	11	41	2,305,872,000	160,540	48,000	24,000	1,250	41	8,382,700
Juni	-	1	39	25	65	-	2	64	28	94	2,976,350,000	134,550	-	72,000	1,000	81	9,741,600
Juli	-	1	42	9	52	-	1	45	9	55	1,778,270,000	118,320	16,000	80,000	-	55	7,675,100
Agustus	20	5	39	21	85	39	7	78	21	145	3,977,679,000	221,199	-	80,000	-	89	8,526,743
September	24	2	41	17	84	63	3	50	19	135	3,145,924,000	232,703	167,200	89,700	240,625	61	14,956,670
Oktober	39	1	31	18	89	106	1	45	19	171	2,314,294,000	145,143	157,700	75,520	245,750	57	15,150,640
November	37	1	27	22	87	142	1	36	25	204	5,919,075,000	374,754	121,150	98,260	168,975	51	21,544,870
Desember					0					0	3,009,504,000	165,059	54,900	64,130	185,550		5,288,800
JUMLAH	125	21	419	148	713	358	30	596	163	1,147	35,565,461,000	1,943,317	957,950	755,430	878,525	729	116,496,949

4. Indeks Profesionalitas (IP) ASN, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

IP-ASN 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	73	14.86	59.44%	38.42	96.05%	24.86	82.87%	4.96	99.20%	83.11	TINGGI

Biro SDMA Data Warehouse x +

← → C Not secure | ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon

IP-ASN 2021

Dashboard [Eselon](#) [Pegawai](#) [Mengenal IP-ASN](#)

Filter:

Kembali ke eselon 1

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	84	14.21	56.84%	31.73	79.33%	24.88	82.93%	4.95	99%	75.77	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	52	15.31	61.24%	38.22	95.55%	24.81	82.7%	5	100%	83.34	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	58	15.17	60.68%	33.28	83.2%	25	83.33%	5	100%	78.45	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPSELABUHAN PERIKANAN	49	16.02	64.08%	37.09	92.73%	25	83.33%	4.92	98.4%	83.03	TINGGI
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	73	14.86	59.44%	38.42	96.05%	24.86	82.87%	4.96	99.2%	83.11	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	75	14.35	57.4%	37.27	93.18%	25	83.33%	4.96	99.2%	81.57	TINGGI
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	48	12.29	49.16%	33.28	83.2%	23.9	79.67%	5	100%	74.47	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	63	13.02	52.08%	36.39	90.98%	23.76	79.2%	5	100%	78.17	SEDANG
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	59	9.64	38.56%	39.49	98.73%	25	83.33%	5	100%	79.14	SEDANG
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	43	11.3	45.2%	39.3	98.25%	25	83.33%	4.91	98.2%	80.51	SEDANG
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	53	11.74	46.96%	33.63	84.08%	25	83.33%	4.92	98.4%	75.29	SEDANG
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA RITUNG	29	13.45	53.8%	31.38	78.45%	25	83.33%	5	100%	74.83	SEDANG

5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi Kinerja dan PM SAKIP adalah sebagai berikut:

Unit	Nilai Aspek				Total Nilai
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan	
Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	25	25	26,69	20	96,69
Catatan: Perlu peningkatan implementasi kegiatan terhadap IKU IP ASN Dit. KP agar capaiannya sesuai dengan target					
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	23,96	25	26,98	20	95,94
Catatan: Perlu melakukan pengecekan kembali terkait penginputan data capaian kinerja sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan					
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	25	25	24,94	20	94,94
Catatan: Perlu peningkatan capaian kinerja pada triwulan IV sehingga NPSS dapat mencapai >100%					

6. Persentase Unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar.

Penilaian IKU MP PDK TW 3 (31 Desember 2021 - 16.30 WIB)									
	Dokumen	Target	Capaian	%		Keaktifan	Target	Capaian	%
	Renstra	1	1	100.00		Level 2	3	3	100.00
	Perjanjian	6	6	100.00		Koordinat	12	12	100.00
	Manual IK	1	1	100.00		Sub Koord	27	27	100.00
	Laporan Ki	1	1	100.00		TOTAL	42	42	100.00
	Rencana K	8	8	100.00					
	TOTAL	17	17	100.00					
						Komponen	Capaian	Bobot	%
	Keikutserta	Target	Capaian	%		Dokumen	100.00	20	20.00
						Keikutsert	100.00	10	10.00
	Level 2	1	1	100.00		Keaktifan	100.00	70	70.00
	Level 3	4	4	100.00		TOTAL			100.00
	Level 4	9	9	100.00					
	Staf	-	-	#VALUE!		TW 1	69.54		
	TOTAL	14	14	100.00		TW 2	83.47		
						TW 3	84.34		
						Rata-rata	84.34		

7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

**Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

No	No LHP	Objek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan					
			Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan Proses	Pending	Proses	Pending	Nilai Keuangan Proses	Pending
	Triwulan IV 2020													
1	4689/IT.JHP.350	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Termin II Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna T.A.2020 (Kegiatan Hibah JICA Jepang) pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	4700/IT.JHP.350	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Termin III Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna T.A.2020 (Kegiatan Hibah JICA Jepang) pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Rekap Triwulan IV 2020			2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Triwulan I 2021													
1	4779/IT.JHP.350	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Termin IV atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Natuna T.A. 2020 (Kegiatan Hibah JICA Jepang) pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Rekap Triwulan I 2021			1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Triwulan II 2021													
1	4879/IT.JHP.11 DIV/2021	Laporan Hasil Audit Probydy Dokumen Tender Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2021 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Rekap Triwulan II 2021			2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Triwulan III 2021													
Rekap Triwulan III 2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekap Total			5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Persentase (%)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

Rekomendasi 5 Tindak lanjut 5
Persentase 100,00%

8. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan

Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan						
JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
Chest Freezer	80	77	73,70	8,08	3,90	85,68
Kendaraan Roda 3 Berinsulasi	41	41	76,83	8,35	3,41	88,60
TOTAL DIT. PDK	121	118	74,79**	8,18**	3,73**	86,69**

9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan

Template Lembar Kerja Penilaian								
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN								
Pada Satker Direktorat Perizinan dan Kelelayanan Tahun 2021								
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Data pendukung
I	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN		100	55				
1	Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021		12.5	12.5				
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2021	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN		Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2021	Dokumen RKBMN Tahun 2021, pada Sekretariat dan Dokumen pendukung usulan dari UAPKPB (Unit Akutansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang)
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2021	A	7.5	7.5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2021 yang dialokasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2021	- Dokumen RKBMN Tahun 2021 - Dokumen RKAKL Tahun 2021
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan I tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	B	25	15	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan PSP BMN terhadap NUP yang belum di PSP	- Data NUP yang belum di PSP - Data usulan PSP BMN - Data capaian PSP BMN
3	Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2018 yang diselesaikan Tahun 2020	A/B/C/D	25	Belum diisi	a. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 80% b. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah NUP yang telah selesai dilakukan perbaikan penilaian kembali BMN (Status Minimal Kirim Laporan Hasil Inventarisasi/LHI) terhadap jumlah NUP yang sudah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN Tahun 2017 - 2018	Data target dan penyelesaian Revaluasi Aset Tahun 2017 - 2018
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian	B	25	15	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah BMN hasil pengadaan Taun 2020 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN	- Data belanja modal Tahun 2020 - BAST/Berita Acara Pemakaian BMN perolehan Tahun 2020
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	12.5	12.5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu		- Penilaian dilakukan terhadap ketepatan waktu penyusunan/pengiriman laporan BMN Semester I Tahun 2021 dan Tahunan (TA2020) - Jadwal penyampaian mengacu pada penyampaian LK unaudited (UAPPA-E1) sesuai PMK 222 Tahun 2016: - Semesteran: 26 Juli (tahun berjalan) - Tahunan 15 Februari (tahun berikutnya)	- Laporan BMN Tahun 2020 dan Laporan BMN Semester I Tahun 2021

